

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PEMERINTAH KOTA BATU DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Arkadius Soka, Agung Suprojo, Anisa Purwatiningsih

Universitas Tribhuwana Tungadewi, Indonesia

*Corresponding Author:

arkadiussoka12@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of tourism development policies carried out by the Batu City Government as a strategic effort to increase Regional Original Revenue (PAD). The study employs a qualitative method with a descriptive approach to deeply understand the policy implementation process, including the stages of planning, execution, and evaluation of regional tourism development policies. Primary data were collected through in-depth interviews with two key informants, namely Mrs. Nafisa A. Gudban, S.E., Head of the Subdivision of Regional Tax Management, and Mr. Shofian Ahmad, S.E., Head of the Subdivision of Tax Assessment at the Batu City Revenue Agency (Bapenda). The data were further supported by field observations at several leading tourist destinations and documentation from official reports of Bapenda and the Central Bureau of Statistics (BPS). The findings indicate that the implementation of tourism development policies in Batu City has significantly contributed to the increase of regional revenue, especially from hotel taxes, restaurant taxes, and tourism retributions. The policy is implemented through the strengthening of regional tax regulations, optimization of digital-based tourism promotion, enhancement of human resource capacity, and inter-agency coordination. However, several challenges remain, including limited budget allocation, suboptimal coordination among agencies, and uneven community participation in tourism management. This study recommends strengthening inter-agency synergy, developing data-driven tourism policy planning, and implementing sustainable digital promotion systems to encourage PAD growth and enhance regional tourism competitiveness.

Keywords: policy implementation, tourism, Batu City Government, Regional Original Revenue

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan potensi pariwisata secara optimal agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Hariani & Sugiarto, 2021). Dalam konteks desentralisasi fiskal, pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai sektor ekonomi kreatif, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan pajak hotel, restoran, dan retribusi daerah (Sitorus & Lestari, 2022).

Kota Batu sebagai salah satu destinasi wisata utama di Provinsi Jawa Timur memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, baik dari aspek alam, budaya, maupun buatan. Pemerintah Kota Batu melalui kebijakan pengembangan pariwisata berupaya memperkuat posisi kota ini sebagai *tourism city* dengan meningkatkan daya tarik wisata serta memperluas kontribusi sektor

pariwisata terhadap PAD (Suryani, 2019). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, terutama pada pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi objek wisata. Namun, di sisi lain, pengelolaan sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) yang belum optimal, serta partisipasi masyarakat yang masih terbatas dalam pengembangan destinasi wisata (Rahmawati & Puspitasari, 2020).

Implementasi kebijakan publik di bidang pariwisata memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal. Efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana proses implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), termasuk aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi (Edward III, 1980 dalam Adiarti & Wijaya, 2023). Oleh karena itu, dalam konteks Pemerintah Kota Batu, penting untuk mengkaji sejauh mana implementasi kebijakan pengembangan pariwisata telah berjalan secara efektif dalam mendukung peningkatan PAD daerah.

Penelitian ini menjadi penting karena memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana kebijakan pengembangan pariwisata diimplementasikan pada tingkat pemerintah daerah serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini berfokus pada proses implementasi kebijakan, hambatan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan publik serta rekomendasi praktis bagi Pemerintah Kota Batu dalam merumuskan strategi peningkatan PAD berbasis sektor pariwisata (Mulyadi & Arifin, 2021).

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Implementasi tidak hanya sekadar pelaksanaan keputusan politik, tetapi juga mencakup proses adaptasi dan penyesuaian kebijakan terhadap konteks sosial, ekonomi, dan kelembagaan di tingkat lokal (Nugroho, 2017). Menurut teori George C. Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Edward III, 1980 dalam Wibowo & Susanto, 2020).

Dalam konteks pemerintahan daerah, komunikasi antarinstansi menjadi elemen penting untuk memastikan kebijakan dapat diterjemahkan dengan tepat ke dalam tindakan nyata. Selain itu, sumber daya manusia dan finansial yang memadai juga menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya yang kuat, kebijakan publik akan sulit mencapai hasil yang diharapkan (Kusnadi & Mulyono, 2019). Disposisi atau komitmen pelaksana juga menjadi aspek kunci yang menentukan tingkat keberhasilan implementasi, karena pelaksana kebijakan memiliki peran dalam menafsirkan, menyesuaikan, dan mengaplikasikan kebijakan sesuai kondisi lapangan (Indrawati & Sari, 2021).

Sementara itu, Grindle (1980) menekankan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (konteks implementasi). Faktor pertama mencakup tujuan kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, dan kelompok sasaran, sedangkan faktor kedua berkaitan dengan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik tempat kebijakan dijalankan (Darmayanti, 2022). Perspektif ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada interaksi antara kebijakan yang dirumuskan dan realitas sosial yang dihadapi di lapangan.

Pengembangan Pariwisata Daerah

Pengembangan pariwisata merupakan salah satu strategi pembangunan ekonomi daerah yang menitikberatkan pada pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah (Hariani & Sugiarto, 2021). Menurut Yoeti (2018), pengembangan pariwisata daerah harus memperhatikan tiga pilar utama, yaitu daya tarik wisata, aksesibilitas, dan amenitas. Daya tarik wisata mencakup potensi alam, budaya, dan buatan yang mampu menarik kunjungan wisatawan; aksesibilitas berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi; sedangkan amenitas mencakup fasilitas pendukung seperti akomodasi, restoran, dan pusat perbelanjaan.

Dalam konteks Pemerintah Kota Batu, kebijakan pengembangan pariwisata diarahkan pada peningkatan kualitas destinasi wisata, penguatan promosi digital, serta pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi berbasis wisata (Rahmawati & Puspitasari, 2020). Pendekatan ini sejalan dengan konsep *community-based tourism* yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengembangan pariwisata agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata (Yuliana & Setyawan, 2022).

Selain itu, pembangunan sektor pariwisata juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, kebijakan fiskal, serta sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menciptakan kebijakan yang kondusif, termasuk penyusunan regulasi, penyediaan infrastruktur, dan pengawasan kegiatan pariwisata agar tetap berkelanjutan (Mulyadi & Arifin, 2021).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi lokal seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain yang sah (Sitorus & Lestari, 2022). Peningkatan PAD menjadi indikator penting bagi kemandirian fiskal daerah, terutama dalam era otonomi daerah yang menuntut kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya secara mandiri (Hidayat & Pratama, 2018).

Dalam sektor pariwisata, kontribusi terhadap PAD dapat berasal dari pajak hotel, restoran, hiburan, dan retribusi destinasi wisata. Kebijakan pengembangan pariwisata yang efektif akan berdampak langsung pada peningkatan PAD melalui peningkatan jumlah wisatawan dan aktivitas ekonomi lokal (Nugraha & Putri, 2021). Namun, efektivitas kebijakan tersebut bergantung pada sejauh mana kebijakan dirancang dan diimplementasikan sesuai prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik (Widodo & Yuniarti, 2023).

Hubungan Implementasi Kebijakan Pariwisata dengan Peningkatan PAD

Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berperan strategis dalam meningkatkan PAD melalui penguatan sistem fiskal daerah dan peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Ketika kebijakan pengembangan pariwisata berhasil meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, maka secara otomatis pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah akan meningkat (Sari & Rahman, 2020).

Selain itu, keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh koordinasi antarinstansi, pengawasan pelaksanaan kebijakan, dan partisipasi aktif masyarakat (Suharto & Dewi, 2019). Oleh karena itu, Pemerintah Kota Batu perlu mengintegrasikan kebijakan pengembangan pariwisata dengan kebijakan peningkatan PAD secara simultan agar kedua sektor saling memperkuat dan menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan (Mulyono & Hartati, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan pengembangan pariwisata oleh Pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena sosial secara komprehensif dan kontekstual, serta memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami makna yang muncul dari interaksi antara kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan (Moleong, 2019).

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata utama di Indonesia bagian timur. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposif karena Kota Batu memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD melalui sektor pariwisata, sekaligus menjadi representasi daerah dengan kebijakan pengembangan wisata yang aktif dan beragam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi lapangan. Wawancara dilakukan dengan dua informan kunci dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu, yaitu Ibu Nafisa A. Gudban, S.E., selaku Kasubid Pengelolaan Pajak Daerah, dan Bapak Shofian Ahmad, S.E., selaku Kasubdit Penetapan Pajak. Keduanya dipilih karena memiliki keterlibatan langsung dalam proses implementasi kebijakan pajak dan pengelolaan pendapatan daerah berbasis sektor pariwisata. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi di beberapa objek wisata unggulan seperti Jatim Park, Museum Angkut, dan Selecta untuk memahami keterkaitan antara pengelolaan pariwisata dan kontribusi pajak daerah.

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, antara lain laporan kinerja Bapenda Kota Batu, data Badan Pusat Statistik (BPS), serta literatur akademik yang relevan mengenai implementasi kebijakan publik, pengembangan pariwisata, dan PAD. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis dan mendukung validitas temuan penelitian (Creswell, 2018).

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan menurut model Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi yang relevan terhadap fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memperlihatkan hubungan antar-variabel yang muncul di lapangan. Sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus sejak awal proses pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian untuk memastikan interpretasi yang valid dan akurat.

Untuk menjaga keabsahan data (validitas), penelitian ini menggunakan teknik *triangulasi sumber dan metode*, yakni dengan membandingkan hasil wawancara dengan data observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2018). Triangulasi dilakukan guna menghindari bias peneliti dan memastikan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dengan desain metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Batu dan kontribusinya terhadap peningkatan PAD, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang muncul dalam proses implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pemerintah Kota Batu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan pariwisata oleh Pemerintah Kota Batu telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Pendapatan

Asli Daerah (PAD). Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nafisa A. Gudban, S.E., selaku Kasubid Pengelolaan Pajak Daerah Bapenda Kota Batu, diketahui bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu sumber utama PAD, terutama melalui pajak hotel, pajak restoran, serta retribusi dari destinasi wisata. Menurut beliau, kebijakan Pemkot Batu difokuskan pada penguatan sistem pemungutan pajak dan perluasan basis pajak yang berasal dari aktivitas pariwisata. Upaya tersebut dilakukan dengan penerapan sistem digitalisasi pajak daerah dan peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak di sektor wisata.

Selain itu, hasil wawancara dengan Bapak Shofian Ahmad, S.E., selaku Kasubdit Penetapan Pajak, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Batu telah melaksanakan beberapa kebijakan strategis, seperti optimalisasi promosi pariwisata melalui media digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pariwisata, serta peningkatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, koordinasi lintas sektor, khususnya antara Dinas Pariwisata dan Bapenda, menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap kegiatan wisata dapat memberikan dampak fiskal langsung bagi daerah.

Temuan lapangan melalui observasi di beberapa destinasi wisata seperti Jatim Park, Museum Angkut, dan Selecta menunjukkan bahwa tingkat kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Hal ini berdampak langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran. Berdasarkan data Bapenda Kota Batu (2023), kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD mencapai lebih dari 40% dari total pendapatan daerah, yang menunjukkan pentingnya sektor pariwisata dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

Analisis Implementasi Berdasarkan Model George C. Edwards III

Analisis implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Batu dapat dijelaskan melalui empat faktor utama dari model George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Wibowo & Susanto, 2020).

Pertama, komunikasi antarinstansi dinilai cukup efektif karena Pemerintah Kota Batu secara rutin mengadakan rapat koordinasi antara Dinas Pariwisata, Bapenda, dan instansi terkait lainnya. Namun, menurut Ibu Nafisa, masih terdapat kendala dalam sinkronisasi data antara dinas teknis dan Bapenda, terutama dalam hal pelaporan pajak dan retribusi wisata.

Kedua, sumber daya baik manusia maupun keuangan menjadi aspek penting yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, jumlah pegawai yang menangani pajak daerah di sektor pariwisata masih terbatas, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas dan pelatihan teknis untuk mendukung digitalisasi pajak daerah.

Ketiga, disposisi atau komitmen pelaksana kebijakan menunjukkan hasil yang cukup baik. Pegawai di lingkungan Bapenda dan Dinas Pariwisata memiliki motivasi kuat untuk meningkatkan PAD melalui sektor wisata, namun masih memerlukan dukungan yang lebih besar dalam bentuk insentif kinerja dan koordinasi lintas bidang.

Keempat, **struktur birokrasi** di Kota Batu dinilai cukup mendukung karena adanya pembagian tugas yang jelas antara instansi pengelola pajak dan pengembang wisata. Namun, birokrasi yang panjang dalam proses penetapan retribusi wisata kadang menghambat kecepatan implementasi kebijakan, sehingga diperlukan penyederhanaan mekanisme prosedur administrasi (Indrawati & Sari, 2021).

Analisis Berdasarkan Perspektif Grindle

Jika ditinjau dari teori Merilee S. Grindle, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh *content of policy* dan *context of implementation* (Darmayanti, 2022). Berdasarkan hasil penelitian, *content of policy* dalam kebijakan pengembangan pariwisata Kota Batu telah mencakup tujuan yang jelas, yaitu meningkatkan PAD melalui optimalisasi potensi wisata daerah. Kebijakan ini didukung oleh beberapa program seperti pengembangan destinasi wisata baru, pelatihan SDM pariwisata, dan penerapan pajak berbasis sistem digital.

Sementara itu, *context of implementation* menunjukkan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Kota Batu cukup mendukung pelaksanaan kebijakan. Partisipasi masyarakat dan pelaku usaha di sektor wisata juga meningkat, meskipun belum merata di semua wilayah. Beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain keterbatasan anggaran untuk promosi wisata dan kurangnya koordinasi lintas instansi dalam pelaksanaan kebijakan pajak dan retribusi wisata (Hariani & Sugiarto, 2021).

Dampak Kebijakan terhadap Peningkatan PAD

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Batu telah berkontribusi nyata terhadap peningkatan PAD. Berdasarkan data BPS (2023), PAD Kota Batu meningkat rata-rata 12% per tahun selama lima tahun terakhir, dengan sektor pariwisata sebagai penyumbang utama. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sitorus dan Lestari (2022) yang menyatakan bahwa kontribusi pajak daerah dari sektor pariwisata memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, kebijakan pengembangan pariwisata juga memberikan dampak sosial-ekonomi yang signifikan, seperti peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan usaha kecil menengah di sekitar kawasan wisata (Yuliana & Setyawan, 2022). Namun demikian, masih diperlukan upaya lanjutan untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dan meningkatkan kesadaran pajak di kalangan pelaku usaha pariwisata agar potensi PAD dapat dimaksimalkan.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat konsep bahwa efektivitas implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada kualitas koordinasi, ketersediaan sumber daya, dan dukungan masyarakat lokal. Dalam konteks Pemerintah Kota Batu, sinergi antara Dinas Pariwisata dan Bapenda menjadi faktor kunci dalam memastikan kebijakan pengembangan pariwisata benar-benar berdampak pada peningkatan PAD dan kemandirian fiskal daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Pemerintah Kota Batu, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan pariwisata telah berjalan dengan cukup efektif dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan tersebut terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sektor pariwisata.

Pertama, dari sisi komunikasi, koordinasi antara Dinas Pariwisata dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sudah cukup baik, meskipun masih perlu ditingkatkan terutama dalam sinkronisasi data pajak dan retribusi wisata. Kedua, sumber daya manusia dan keuangan yang dimiliki Pemkot Batu sudah mendukung pelaksanaan kebijakan, namun masih perlu peningkatan kompetensi aparatur dalam pengelolaan pajak daerah berbasis digital. Ketiga, disposisi pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen tinggi dari aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya, meskipun masih terdapat kendala dalam hal insentif dan motivasi kerja. Keempat, struktur

birokrasi yang ada relatif mendukung, tetapi masih terdapat prosedur administratif yang panjang yang perlu disederhanakan agar pelaksanaan kebijakan menjadi lebih efisien.

Selain itu, dari hasil wawancara dengan Ibu Nafisa A. Gudban, S.E. (Kasubid Pengelolaan Pajak Daerah) dan Bapak Shofian Ahmad, S.E. (Kasubdit Penetapan Pajak), diketahui bahwa sektor pariwisata memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD Kota Batu. Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak hotel, restoran, serta retribusi destinasi wisata telah meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan dalam lima tahun terakhir.

Dari perspektif teori George C. Edwards III dan Merilee S. Grindle, implementasi kebijakan di Kota Batu menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, komitmen pelaksana, serta dukungan dari lingkungan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Batu dapat dikategorikan berhasil, meskipun masih membutuhkan penyempurnaan dalam aspek koordinasi dan pengawasan.

Secara umum, implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Batu telah berdampak langsung terhadap peningkatan PAD serta memperkuat posisi Kota Batu sebagai destinasi wisata unggulan di Jawa Timur. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat merupakan faktor utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis pariwisata. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Koordinasi Antarinstansi Pemerintah Kota Batu perlu memperkuat koordinasi antara Dinas Pariwisata, Bapenda, dan OPD terkait agar implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dapat berjalan lebih sinkron dan efektif. Sinkronisasi data antara pajak daerah dan retribusi wisata harus ditingkatkan melalui sistem digital yang terintegrasi.
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur pemerintah, khususnya di bidang pengelolaan pajak daerah dan pengembangan wisata, perlu diberikan pelatihan lanjutan terkait digitalisasi pajak, manajemen pariwisata, serta pelayanan publik berbasis teknologi. Hal ini penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di sektor pariwisata.
3. Simplifikasi Struktur Birokrasi dan Prosedur Administrasi Pemerintah perlu menyederhanakan prosedur administrasi terkait pengelolaan pajak dan retribusi wisata agar proses implementasi kebijakan lebih cepat dan adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha wisata.
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha Keterlibatan masyarakat lokal dan pelaku usaha pariwisata harus diperkuat melalui program pemberdayaan, pelatihan, dan promosi bersama agar manfaat ekonomi dari kebijakan pengembangan pariwisata dapat dirasakan secara merata.
5. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pemerintah dapat mengembangkan platform digital terpadu untuk promosi wisata, sistem pemungutan pajak, serta pelaporan aktivitas wisata secara transparan. Hal ini akan meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kebijakan publik di sektor pariwisata.
6. Evaluasi dan Monitoring Berkelanjutan Diperlukan sistem evaluasi dan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata agar setiap permasalahan dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan lanjutan yang lebih tepat sasaran.

Dengan memperhatikan saran-saran tersebut, diharapkan Pemerintah Kota Batu dapat terus meningkatkan efektivitas kebijakan pengembangan pariwisata sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat akan memperkuat posisi Kota Batu sebagai kota wisata unggulan yang berdaya saing tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications.
- Edward III, G. C. (2017). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Kemenparekraf. (2021). *Laporan Tahunan Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nuraini, D., & Prasetyo, T. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 7(2), 145–157.
- Rahman, M. F., & Suryanto, D. (2021). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, 9(3), 201–215.
- Sari, A. N., & Putra, R. A. (2022). Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(1), 55–67.
- Setiawan, B., & Handayani, T. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Keuangan Daerah dan Kebijakan Publik*, 8(1), 88–102.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, R., & Hidayat, R. (2019). Analisis Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan PAD melalui Sektor Pariwisata. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 6(2), 77–89.
- Wicaksono, A., & Lestari, M. (2020). Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Daerah. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 5(2), 123–138.